

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MUARAWIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kevin Tio Prasetyo¹, Iman Surya², Nur Hasanah³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa dalam pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah Kepala desa serta staf desa, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa Muara Wis. Temuan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan atau program prioritas pembangunan fisik hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2016 dapat dilihat belum efektif sepenuhnya karena dalam realisasinya masih ada beberapa kegiatan atau program yang dalam tahap pembangunan, dimana masih terdapat kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penentuan waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Dalam ketepatan sasaran kegiatan atau program belum sepenuhnya efektif karena adanya berbagai kendala maupun hambatan didalam pelaksanaannya seperti permasalahan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan program maupun susahny mencari bahan baku serta bencana banjir. Dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan program pembangunan fisik pemerintah desa menggunakan beberapa media untuk menyebarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat seperti dengan menggunakan poster, spanduk dan komunikasi secara langsung atau face to face dengan masyarakat. Dalam melakukan komunikasi baik saat perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah desa menggunakan bentuk komunikasi kelompok dan interpersonal atau secara langsung dengan masyarakat. Untuk kesesuaian kegiatan atau program terhadap aspirasi, permasalahan dan potensi yang ada di desa, pihak desa mengangkat program berdasarkan hasil dari musrenbang tingkat RT, yang kemudian dibawa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kevityoprass@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pada pra-musrenbang desa untuk menetapkan skala prioritas kegiatan atau program.

Kata Kunci: Efektivitas, musrenbangdes, pembangunan

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 ayat 8, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat masyarakat desa seutuhnya. Seperti yang dilakukan di Desa Muara Wis, dimana satu diantaranya adalah pembangunan fisik desa, seperti rehab gedung BPU, pembangunan gedung paud, pembangunan jalan jembatan ulin dan semenisasi jalan jembatan ulin gang. Namun demikian dalam kenyataannya, pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada asas pemerataan dan pertumbuhan, masih ditemukan banyak kendala dan kepincangan. Hal ini terlihat di dalam proses pembangunan di daerah pedesaan yang masih lamban, tidak merata, dan ada beberapa program yang belum berjalan serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Muara Wis, pembangunan desa yang dilakukan di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Desa Muara Wis tahun anggaran 2016 pada kegiatan atau program pembangunan fisik.

Dalam pelaksanaan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dalam pembangunan fisik di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 masih belum berhasil sepenuhnya dan masih terdapat beberapa kegiatan atau program yang dalam tahap pembangunan seperti pembangunan gedung PAUD dan kegiatan atau program yang belum terlaksana seperti pembangunan ruang kantor BPD. Dapat dilihat dari beberapa kegiatan pembangunan fisik di atas belum semua mencapai target yang diharapkan (100%). Program-program tersebut dalam realisasinya, dimana masih terdapat kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam proses pembangunan fisik di Desa Muara Wis yakni, keterbatasan anggaran, sulitnya mencari bahan baku dan faktor alam seperti banjir. Serta kurangnya strategi dalam melaksanakan program pembangunan fisik.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik, untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Organisasi

Robbin (2003:5) organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang telah terkoordinasi secara sadar dengan adanya sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi serta bekerja berdasarkan yang relatif secara terus-menerus agar dapat mencapai tujuan bersama. Siagian (2007:30) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok yang dikenal sebagai bawahan. Sedangkan Menurut Hasibuan (2005:24-25) organisasi adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengontrolan segala macam tindakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan secara bersama. Secara umum dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Efektivitas

Bastian dalam Tangkilisan (2005:48) menyatakan efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya bahwa efektivitas dapat dilihat melalui pencapaian hasil yang kemudian disesuaikan dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sumaryadi (2005:105) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan seperti yang dikemukakan

oleh Riyadi dan Supriady (2005:6) merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan dalam bidang apapun, pada hakekatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan. Oleh sebab itu musrenbang dapat dijadikan wadah yang tepat untuk mengembangkan usaha perencanaan pembangunan, membangun sinergi antar seluruh *stakeholder* dalam memecahkan masalah dan mencari alternatif-alternatif pembangunan yang lebih baik.

Musrenbang Desa

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 21, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Forum Musrenbang menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan tingkatan pemerintah yang dimulai dari forum musrenbang tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga musrenbang tingkat nasional (pusat). Ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan secara *bottom-up*, yaitu dimana masyarakat ikut terlibat melalui forum musyawarah di tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan dalam musrenbang.

Musrenbang desa adalah forum perencanaan atau program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari 3 komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan

Wrihatnolo dan Nugroho (2006:10) pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dan definisi ekonomi, sosial, politik dan hukum. Soetomo (2009:8) pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kondisi ideal atau kondisi kehidupan yang lebih baik sebagai konsep netral. Pembangunan yang dimaksudkan adalah untuk

menggambarkan realitas sosial masyarakat dalam struktur dan fungsi sehingga dalam kehidupan sosial membawa masyarakat berada dalam kondisi yang lebih baik dalam memenuhi tujuan dan harapannya. Haryono (2002:15) pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu pembangunan dapat diartikan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut dengan pembangunan.

Dari pendapat diatas maka dapat menyimpulkan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan baik itu dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok-pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara”. yaitu:

1. Untuk mengukur Efektivitas pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, Penulis menggunakan tiga indikator, yaitu:
 - 1) Pencapaian tujuan
 - a) Waktu Pelaksanaan

- b) Sasaran
 - 2) Integrasi
 - a) Sosialisasi
 - b) Komunikasi
 - 3) Adaptasi
 - a) Kesesuaian Program dengan Lingkungan
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian

Efektivitas pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Pencapaian Tujuan

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain sebuah kebijakan itu disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan pada aspek untuk meneliti sejauh mana pencapaian tujuan dari efektivitas pelaksanaan musrenbang desa dalam pembangunan fisik di Desa Muara Wis. Berikut gambaran mengenai pencapaian tujuan berdasarkan sub-indikator, yaitu waktu pelaksanaan pencapaiannya dan sasaran kegiatan atau program.

Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program-program pembangunan fisik tersebut pihak pemerintah desa telah berusaha untuk melaksanakan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih ada beberapa program yang mengalami keterlambatan karena adanya beberapa kendala seperti permasalahan anggaran, kekurangan bahan baku dan bencana banjir. Sejauh ini upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan anggaran yaitu dengan mencari pinjaman dana pada pihak ketiga sambil menugggu cairnya dana desa sehingga kegiatan atau program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian cara ini memiliki resiko yang besar jika pemerintah desa tidak transparasi dalam penggunaan anggaran karena dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kemudian permasalahan bahan baku pemerintah desa dapat berupaya dengan mencari bahan baku ditempat lain atau terdekat namun risikonya biaya bahan baku lebih besar atau membengkak menjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dianggarkan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya

permasalahan banjir, pemerintah desa belum memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut karena letaknya desa yang berada pada bantaran sungai mahakam sehingga hampir setiap tahun desa terkena musibah banjir yang otomatis mengganggu pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan desa.

Kemudian pemerintah desa sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan atau program sesuai dengan waktu yang ditentukan, namun untuk seluruhnya berjalan tepat pada waktunya pemerintah desa mengalami kesulitan karena adanya hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut. Kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu permasalahan anggaran, kekurangan bahan baku karena mayoritas menggunakan kayu ulin dan bencana banjir.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumen, untuk hasil kegiatan atau program prioritas pembangunan fisik hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disetujui akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan fisik. Sehingga ada beberapa kegiatan atau program pembangunan fisik yang berjalan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti program pembangunan gedung PAUD dan program pembangunan jembatan ulin penghubung feri yang selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. serta ada 1 program yang belum terlaksana yaitu program pembangunan ruang kantor BPD.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menjelaskan bahwa sejauh ini kegiatan atau program pembangunan fisik sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tetapi dalam hal penentuan waktu pelaksanaan dan rencana kerja belum terstruktur dengan baik dan terdapat beberapa kendala seperti sulitnya mencari bahan baku dan bencana banjir, sehingga terdapat beberapa program yang berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti program pembangunan gedung PAUD dan program pembangunan jembatan ulin penyebrangan feri. Penentuan waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Sasaran Program

Secara garis besar, sasaran ini merupakan suatu cara untuk memperoleh hasil yang efisien (hemat guna) dalam bidang tenaga dan pikiran, material dan biaya yang diperlukan dan waktu yang tepat, cepat dan hemat. Dalam arti, segala sesuatunya dilakukan dengan berdaya guna dan tepat guna (tepat, cepat, hemat, dan selamat).

1. Efisien perbandingan yang terbaik antar suatu hasil dengan usahanya atau antara pemasukan dengan pengeluaran.
2. Efektif suatu kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan sesuai dengan rencana (tepat waktunya).

3. Tepat menunjukkan kena sasaran, apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
4. Cepat menunjukkan waktu tidak banyak waktu terbuang, selesai pada waktunya.
5. Hemat berarti dengan biaya yang sekecil-kecilnya diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, tanpa adanya pemborosan atau penghamburan biaya, bahan, tenaga, waktu dan pemikiran.
6. Selamat menunjukkan kelancaran proses, segala sesuatunya sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelambatan atau kemacetan-kemacetan.

Sejalan dengan apa yang kita lihat, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*" yang berarti keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial adalah proses menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing.

Sosialisasi

Pemerintah Desa Muara Wis sejauh ini sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program dengan memberikan informasi dan penjelasan secara langsung kepada masyarakat serta menggunakan media poster ataupun spanduk. Secara umum masyarakat cukup baik merespons kegiatan atau program pembangunan fisik ini namun ada beberapa masyarakat yang masih belum memahami tujuan dan manfaat mengenai program pembangunan fisik tersebut. Tetapi dari pemerintah desa selalu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan atau program pembangunan fisik tersebut. Karena tujuan dari program ini adalah untuk mensejahterahkan masyarakat pedesaan.

Sosialisasi program atau kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa sudah berusaha mensosialisasikan pelaksanaan program pembangunan fisik kepada masyarakat namun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan program tersebut. Hal ini tentu saja sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup efektif dalam mensosialisasikan pelaksanaan program pembangunan fisik,

namun untuk kedepannya diharapkan pihak pemerintah Desa Muara Wis harus lebih inovatif dalam menyampaikan informasi dan penggunaan media sosialisasi seperti pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju.

Komunikasi

Pemerintah Desa Muara Wis selalu melakukan komunikasi baik saat perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menggunakan bentuk komunikasi kelompok dan bentuk komunikasi interpersonal. Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat pemerintah Desa Muara Wis menggunakan media mengadakan rapat dengan mengundang masyarakat serta memasang baliho/spanduk agar masyarakat mengetahui kegiatan atau program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.

Bentuk komunikasi yang masih efektif dan masih sering digunakan oleh pemerintah Desa Muara Wis dalam pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik adalah pendekatan komunikasi kelompok dan pendekatan secara interpersonal, sementara untuk pendekatan menggunakan komunikasi massa belum dioptimalkan. Media atau saluran yang masih dominan digunakan oleh pemerintah Desa Muara Wis dalam pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik adalah melalui rapat desa, baliho/spanduk dan juga penyampaian melalui rukun tetangga (RT) atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa tersebut. Sementara untuk penggunaan media atau saluran seperti media sosial dan website desa, masih belum dimanfaatkan dikarenakan sumber daya yang bisa menggunakan media-media baru tersebut masih kurang memahami cara penggunaan. Kendala/hambatan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik masih sering ditemui oleh pemerintah Desa Muara Wis, antara lain adalah adanya beberapa masyarakat yang masih belum bisa berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik dengan berbagai alasan.

Adaptasi

Adaptasi merupakan sistem harus mampu mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Artinya sistem harus mampu beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan beserta segala kebutuhannya. Adaptasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu dan ini dilakukannya, untuk menanggulangi dan atau menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya.

Kesesuaian Program dengan Lingkungan

Kesesuaian program terhadap lingkungan di desa Muara Wis disesuaikan melalui aspirasi masyarakat dengan berdasarkan kebutuhan, permasalahan dan

potensi yang ada di desa. Penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan melalui forum musrenbang tingkat rukun tetangga (RT), yang kemudian usulan kegiatan atau program prioritas tiap rukun tetangga (RT) dibawa pada pra-musrenbang desa untuk menentukan skala prioritas kegiatan atau program pada bidang fisik, sosial budaya dan ekonomi. Yang Kemudian menetapkan kegiatan atau program prioritas tersebut pada musrenbang desa.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan pembangunan pedesaan harus melibatkan partisipasi masyarakat yang diawali dari kegiatan yang disebut sebagai rembug desa atau musrenbang tingkat rukun tetangga (RT) . Kegiatan ini dilaksanakan pada lingkup rukun tetangga (RT) sebagai forum untuk menyerap aspirasi warga mengenai masalah-masalah yang dirasakan dan kebutuhan program atau kegiatan pembangunan. Aspirasi tersebut selanjutnya dibawa ke forum yang lebih tinggi yakni desa atau kelurahan melalui kegiatan yang disebut Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan).

Berbeda dari ketentuan tersebut dan mengamati bagaimana pelaksanaan musrenbangdes di Desa Muara Wis tampak belum semua rukun tetangga (RT) menyelenggarakan kegiatan rembug warga atau musrenbang tingkat rukun tetangga (RT), walaupun dalam musrenbangdes, ketua atau pengurus rukun tetangga (RT) tersebut turut hadir serta membahas rencana pembangunan desa/kelurahan. Guna menyerap aspirasi warga mengenai rencana pembangunan desa, Desa Muara Wis telah menyisipkan formulir atau daftar masalah-masalah tingkat rukun tetangga (RT). Formulir ini memang bagus karena dengan demikian memberikan arahan bagi ketua atau pengurus rukun tetangga (RT) agar dapat melakukan pencatatan atau pendaftaran permasalahan atau kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Namun demikian kegiatan rembug warga atau musrenbang tingkat rukun tetangga (RT) tetap perlu dilaksanakan. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sangat mungkin aspirasi warga dalam kegiatan rembug warga atau musrenbang tingkat rukun tetangga (RT) yang tidak diselenggarakan tidak teradopsi dalam diskusi atau musyawarah di tingkat desa. Kehadiran ketua atau perwakilan rukun tetangga (RT) belum tentu dapat merepresentasikan masalah dan kebutuhan masyarakat di lingkup rukun tetangga (RT) nya. Situasi ini dapat berdampak tidak terakomodasikannya kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam kegiatan rembug warga yang tidak diselenggarakan. Indikasinya ialah bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrenbangdes ternyata tidak merata di semua wilayah desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu pada waktu yang akan datang ketentuan tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan yang bagus tersebut melibatkan partisipasi warga perlu dilaksanakan. Perangkat desa dapat mendorong dan memonitor kegiatan tersebut di lingkungan rukun tetangga (RT) di wilayah desa sehingga semua masalah, kepentingan dan kebutuhan warga dapat terpetakan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dalam Pembangunan Fisik

1. Keterbatasan Anggaran dan Keterlambatan Pencairan Anggaran.
Keterbatasan dana dan keterlambatan pencairan dalam anggaran desa merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan program-program pembangunan fisik di Desa Muara Wis, hal ini mengakibatkan program-program yang sudah ditentukan pelaksanaannya mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, seperti program pembangunan gedung PAUD dan program pembangunan jembatan ulin penghubung feri. Permasalahan ini terjadi pada desa lainnya selain Desa Muara Wis, atas kejadian ini maka pemerintah Desa Muara Wis berkomitmen untuk menyelesaikan program-program yang terhambat tersebut setelah dana tersebut sudah cair. Untuk pencairan dana desa muara wis dilakukan 2 tahap. Tahap pertama cair pada bulan juli sebesar 60% dan tahap kedua cair pada bulan september sebesar 40%, namun pada tahap kedua ini mengalami keterlambatan pencairan sehingga bulan 12 baru dapat dicairkan yang otomatis mengganggu dalam pelaksanaan program pembangunan fisik Desa Muara Wis.
2. Keterbatasan Serta Susahnya Mencari Bahan Baku.
Terbatas dan sulitnya mendapatkan kayu ulin ini dikarenakan keberadaan kayu ulin ini di kabupaten lain yaitu Kabupaten Kutai Barat serta peminat kayu ulin ini cukup banyak untuk desa bahkan kabupaten lainnya, oleh sebab itu ketersediaan kayu ulin cukup terbatas dan pendistribusian kayu ulin ini hanya dengan transportasi air yaitu menggunakan kapal dan dalam pendistribusiannya melalui kapal ini ada beberapa kendala yang dihadapi seperti cuaca buruk sehingga akan memakan waktu yang cukup lama sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat waktu. Persediaan kayu ulin bisa didapatkan di tempat lain namun dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan pembengkakan dalam anggaran diluar dari kesepakatan yang telah direncanakan.
3. Banjir
Banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai mahakam, mengingat letak Desa Muara Wis dibantaran sungai mahakam maka bencana banjir ini tidak dapat dihindari dan bencana banjir ini tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya mengingat hal ini merupakan faktor alam. Hal ini berdampak pada tidak dapat berjalannya beberapa aktivitas bagi masyarakat setempat dan aktivitas pembangunan bagi pemerintah desa karena akses jalan bagi penyediaan bahan baku tertutup oleh banjir.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dalam pembangunan fisik di Desa Muara Wis tahun 2016 sudah cukup efektif. Kegiatan atau program pembangunan fisik mayoritas telah

dilaksanakan dan diselesaikan. Namun memang dari segi waktu pelaksanaan maupun sasaran masih belum sesuai dengan yang ditentukan. Masih terdapat beberapa kegiatan atau program yang selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, seperti program pembangunan gedung PAUD dan program pembangunan jembatan ulin penyebrangan feri. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kendala maupun hambatan didalam pelaksanaannya seperti permasalahan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan program maupun susahny mencari bahan baku karena mayoritas menggunakan kayu serta bencana banjir.

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu pencapaiannya ditentukan dan sasaran merupakan target yang konkret. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tetapi dalam hal penentuan waktu pelaksanaan dan rencana kerja belum terstruktur dengan baik dan terdapat beberapa kendala seperti susahny mencari bahan baku dan bencana banjir, sehingga terdapat beberapa program yang berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti program pembangunan gedung PAUD dan program pembangunan jembatan ulin penyebrangan feri. Sedangkan untuk sasaran pelaksanaan kegiatan atau program prioritas pembangunan fisik hasil musrenbang Desa Muara Wis tahun 2016 sudah cukup sesuai dengan keinginan masyarakat dan permasalahan yang ada di desa. Namun masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena adanya berbagai kendala maupun hambatan didalam pelaksanaannya seperti permasalahan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan program maupun susahny mencari bahan baku.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi pelaksanaan dalam kegiatan atau program terhadap masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup efektif dalam mensosialisasikan pelaksanaan program pembangunan fisik. Selama ini pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi program, dengan menggunakan beberapa media untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat seperti dengan menggunakan poster, spanduk dan komunikasi secara langsung atau *face to face* dengan masyarakat. Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat pemerintah Desa Muara Wis menggunakan media rapat dengan mengundang masyarakat agar masyarakat mengetahui kegiatan atau program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari kesesuaian pelaksanaan program

dengan keadaan di lapangan. Kesesuaian kegiatan atau program terhadap aspirasi, permasalahan dan potensi yang ada di desa sudah cukup baik. Program-program prioritas yang ada diambil berdasarkan hasil dari musrenbang tingkat RT, yang kemudian dibawa pada pra-musrenbang desa untuk menetapkan skala prioritas kegiatan atau program. Namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

2. Faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa Muara Wis dalam pembangunan fisik yaitu:
 - a. Keterbatasan anggaran yang merupakan poin penting dalam pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan fisik desa.
 - b. Susahnya mencari bahan baku karena kegiatan atau program mayoritas menggunakan bahan baku kayu yang harus memesan di daerah kabupaten lain.
 - c. Bencana banjir karena Desa Muara Wis yang terletak pada bantaran sungai mahakam.

Saran

1. Pembuatan rencana kerja secara terstruktur agar dapat dilakukan penentuan waktu yang tepat serta agar setiap kegiatan dapat terlaksana secara terukur dan tepat sasaran. Pembuatan rencana kerja secara terstruktur ini juga ditujukan agar dapat mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan atau program kerja.
2. Diperlukan pengaktifan kembali badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai sumber pendapatan desa untuk memenuhi kebutuhan anggaran dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di desa.
3. Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik, namun perlu dilakukan pengembangan dan inovasi sesuai dengan perkembangan IPTEK yang ada, seperti menggunakan media sosial, website, atau aplikasi yang dapat menunjang berjalannya sosialisasi secara efektif dan efisien.
4. Jika bahan baku yang dibutuhkan tidak didapatkan, maka perlu dicari alternatif lain yang memiliki fungsi yang sama sehingga program tetap dapat berjalan dengan menggunakan bahan lain yang memiliki fungsi yang sama dengan bahan baku yang dibutuhkan.
5. Pemerintah Desa Muara Wis perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat rukun tetangga (RT) agar mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mendekati potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Pusaka.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nugroho Riant, dan Wrihatnolo. 2004. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Coputindo.
- Robbin, Stephen P. 2003. *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcan.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Sepuluh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sundriamunawar, Haryono.2002. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetomo. 2009. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Artikel dan Jurnal:

- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume: 2, Nomor: 1, Stepanus Henryk (2013) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume: 2, Nomor: 2, Rika Misiyanti (2014) *Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*.
- Jurnal Ilmu Sosial, Volume: 13, Nomor: 1, Dzunuwanus Ghulam Manar (Februari 2014) *Evaluasi Perencanaan Pembangunan: Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang Di Jawa Tengah*.
- Jurnal Ekonomi dan Sosial, Volume: 2, Nomor: 1, Ni Wayan Budiani (2007) *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*.